

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang

berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar bagi pengambil keputusan di bidang keuangan atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Standar ini dibutuhkan bagi Pemda dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi satu set laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika Badan Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau disebut juga Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Selama ini peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia masih terus diupayakan karena dalam pelaksanaannya belum mencapai hasil yang memuaskan

sesuai pedoman yang ditetapkan. Kesalahan dan ketidak tertiban baik dalam pengelolaan atau penyajian laporan keuangan di pemerintah daerah saat ini masih menjadi isu sentral. Problematika lainnya kualitas sumber daya manusia aparat Pemda belum sepenuhnya dapat mengelola keuangan secara komprehensif, Riyanto, T (2010) dalam Halim, A(2010 : 87).

Salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah kompetensi sumber daya manusia. Di mana laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebab dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka peranan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik. Tugas yang dibebankan kepada sumber daya tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan, Ropiyantie (2012) dalam Wati dkk (2014).

Selain faktor di atas penyusunan laporan keuangan juga diperlukan adanya sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan

daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut. Berdasarkan hasil audit BPK, banyak pemerintahan daerah yang belum menyajikan laporan keuangan secara wajar, Wati dkk (2014).

Dalam penerapan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebab sistem akuntansi pemerintah perlu memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer supaya efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan keuangannya dapat tercapai. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat mempengaruhi tingkat kepuasan penggunaan laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik pula. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat

dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara, Udiyanti dkk (2014).

Apabila karyawan merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dan nyaman dalam bekerja, sehingga akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan segala aktivitas dengan menjalankan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan, dengan demikian laporan keuangan bebas dari salah saji material sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, Meyer dan Allen (1997) dalam Ratifah (2012).

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian dari Udiyanti, dkk (2014), Susilawati dan Riana (2014), serta Nurillah dan Muid (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Setiyawati (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini akan menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian Nurillah dan Muid (2014) serta Ratifah dan Ridwan (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tahun, objek penelitian dan adanya penambahan variabel independen. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dan adanya penambahan variabel independen yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang baik dan berkeinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti untuk organisasi. Kontribusi yang berarti dalam pengelolaan keuangan negara adalah untuk menghasilkan laporan keuangan transparan untuk menyajikan dan mengungkapkan semua transaksi keuangan dan mengendalikan semua kekayaan dengan harapan mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Semarang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan yang diamanahkan oleh rakyat. Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Didalam hubungan keagenan antara pemerintah dengan rakyat dapat menimbulkan informasi asimetris. Untuk mengurangi asimetris informasi, pemerintah perlu melaporkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas.

Adapun faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern Pemerintah dan komitmen organisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi komponen akademik sebagai referensi bagi peneliti di bidang keuangan sektor publik.